BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam dunia usaha yang semakin berkembang saat ini, setiap negara berlomba-lomba untuk mencapai tujuan dalam sebuah usahanya. Beberapa upaya dilakukan oleh setiap negara untuk mendukung pengembangan perusahaannya di antaranya termasuk Indonesia. Salah satunya melalui program-program di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN pada dasarnya adalah sebuah lembaga ekonomi berskala besar yang berkembang dan dikembangkan tidak hanya untuk mengejar motif-motif ekonomi, tetapi juga untuk mengembangkan misi sosial untuk membantu melayani dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya (Wahyuni, 2015).

Definisi BUMN menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada awal tahun 2008, jumlah BUMN yang berada dibawah pembinaan Kementerian BUMN adalah sebanyak 140 BUMN dengan total asset lebih dari Rp 1.400 triliun dan bergerak hampir seluruh bidang perekonomian (Wahyuni, 2015). Mengingat BUMN memegang peranan yang signifikan dan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional, maka BUMN perlu di kelola secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam BUMN diperlukan pengawasan terhadap pengalokasian dana yang telah diberikan oleh pemerintah

agar lebih transparan, sama seperti sektor swasta maka dalam perusahaannya membutuhkan manajemen yang perlu mendelegasikan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya kepada pihak lain yaitu audit internal (Muslim, 2013).

Auditor internal bertujuan untuk membantu semua bagian dalam perusahaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Audit internal akan memberikan penilaian, pandangan ataupun saran-saran yang akan dapat membantu semua bagian. Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya secara efektif (Hiro Tugiman, 2011:99).

Menurut Badjuri (2004) Independensi auditor diperlukan karena auditor sering disebut pihak pertama yang dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja. Hal ini karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen. Walaupun pada kenyataan prinsip independen ini sulit untuk benar-benar dilaksanakan secara mutlak, antara auditor internal dan auditee harus berusaha menjaga independensi tersebut sehingga tujuan audit dapat tercapai.

Independensi merupakan hal penting ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi adanya tarik-menarik berbagai kepentingan pada satu atau pada lebih objek tertentu yang berusaha memengaruhi pengambilan keputusan atau pemberi pendapat agar terpengaruh pada kepentingan kelompok atau subjek tertentu. Padahal seharusnya, pengambilan keputusan atau pemberian pendapat harus dilakukan secara bebas tanpa terikat dan tanpa dipengaruhi pihak

manapun terutama karena adanya kepentingan umum dan bersama dari semua komponen dan pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung (Budyaningih, 2006).

Fenomena yang terjadi yaitu pada PT KAI pada tahun 2005. Permasalahan yang terjadi pada PT KAI, Komisaris Utama PT KAI Soemino Eko Saputro menyangkal adanya kekeliruan dan penyelewengan dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2005. Laporan keuangan sudah dibuat sesuai syarat dan unsur akuntansi. Tudingan laporan keuangan PT KAI tidak beres diungkap Hekinus Manao, seorang diantara komisaris BUMN pengelola transportasi publik itu. Hekinus menyatakan, manajemen dan akuntan publik melakukan kekeliruan audit pada penempatan status pajak pertambahan nilai (PPN) dan inventaris pengadaan sehingga mengakibatkan posisi keuangan PT KAI jauh berbeda, Hekinus menilai seharusnya PT KAI merugi sekitar Rp 600 miliar. Namun hasil audit justru mencatatkan PT KAI meraup laba Rp 6,9 miliar. Beberapa data yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan, hal inilah yang patut dipertanyakan (<http://news.liputan6.com>).

Dalam kasus ini terjadi suatu tindakan yang tidak jujur, keterbukaan dan pelanggaran yang dilakukan oleh auditor internal, dimana auditor menyatakan bahwa laporan keuangan dalam kondisi wajar yaitu perusahaan memperoleh

keuntungan sebesar 6,9 miliar sedangkan kondisi yang sebenarnya perusahaan mengalami kerugian 600 miliar.

Fenomena lain yang terjadi yaitu pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP). Pangkal soalnya, AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Sanksi yang diterima dua AP dan satu KAP itu berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP Finance. Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan pengenaan sanksi terhadap dua AP dan KAP itu berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank (IKNB). Artinya untuk sementara mereka tidak dapat melakukan proses audit jasa keuangan. Pembatalan pendaftaran KAP SBE berlaku efektif setelah KAP tersebut menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 para klien yang masih memiliki kontrak. KAP SBE juga dilarang untuk menambah

klien baru. Sementara untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada Senin (1/10). “Sanksi yang dijatuhkan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sanksi ini juga berlaku bagi emiten-emiten yang menerbitkan efek dan saham, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” jelas Anto kepada Tirto. OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017 (PDF), bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Sementara itu, KAP SBE yang merupakan partner lokal Deloitte Indonesia, menegaskan belum menerima salinan resmi putusan OJK tersebut. Dengan begitu, pihaknya belum bisa memutuskan langkah apa yang akan ditempuh. KAP SBE menambahkan, pihaknya telah menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan. Namun KAP SBE menyatakan sama sekali tidak pernah diminta untuk memberikan keterangan terkait LKTA SNP Finance oleh OJK. “KAP SBE juga masih mempelajari opsi-opsi yang dapat ditempuh,” tulis KAP SBE dalam keterangan resmi yang diterima Tirto. (Sumber : <https://tirto.id>)

Fenomena lain yang terjadi yaitu pada Bank Century yang dimana dalam kasus ini pihak auditor tidak bertindak independen dalam auditnya, terjadinya persekongkolan antara pihak manajemen dengan pihak auditor, dalam hal ini

auditor menerima suap dengan me *mark up* laporan keuangan bank century yang telah tidak sehat lagi yaitu bangkrut menjadi sehat, hal ini bertujuan agar memperoleh dana pinjaman dari Bank Indonesia berjalan lancar dan para investor tertarik menanamkan sahamnya selain itu untuk menarik nasabah sebanyak banyaknya ke dalam Bank Century, auditor telah melanggar independensi yang telah ada, dilihat dari kasus ini melanggar hal independensi sebagai auditor menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor menjadi berkurang. (www.sinarharapan.co.id)

Banyak hal yang semakin memojokkan profesi auditor internal, sehingga membuat masyarakat beranggapan bahwa auditor internal akan sulit bahkan tidak bisa mempertahankan komitmen untuk bersikap independen. Perubahan peran auditor internal dan berkembangnya kegiatan di dalam organisasi membuat auditor internal memiliki tugas dan peran yang lebih luas dan semakin berat untuk mempertahankan sikap independen mereka. Adapun ancaman terhadap independensi yang dialami oleh auditor internal salah satunya munculnya tekanan peran (*role stress*) dalam bentuk *role ambiguity* dan *role conflict* (Agustina, 2009).

Pertama, tentang *Role Ambiguity* atau Ketidakjelasan Peran. *Role Ambiguity* sering kali sulit untuk didefinisikan. Secara umum konsep yang diterima mengenai *role ambiguity* menurut Arfan Ikhsan Lubis (2010:58) menyatakan bahwa ketidakjelasan adalah tidak cukupnya informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban yang jelas dan hubungan lainnya. Menurut Robbins

(2015:306) menyatakan bahwa ambiguitas peran tercipta manakala ekspektasi peran tidak dipahami secara jelas dan karyawan tidak yakin apa yang ia lakukan. Ambiguitas peran dirasakan seseorang jika ia tidak memiliki cukup informasi untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti atau merealisasikan garapan-harapan yang berkaitan dengan peran tertentu.

Menurut Sawyer dan Dittenhofer dalam Ahmad dan Taylor (2009), penyebab terjadinya ambiguitas peran dalam lingkungan auditor internal adalah bahwa auditor internal mungkin melakukan investigasi internal dengan kondisi proses operasional yang belum dikenali, kompleks, dan semakin meluas, serta individu yang berada dalam objek pemeriksaan berbicara dalam bahasa dan menggunakan istilah yang asing bagi pemahaman auditor internal. Sekarang ini perusahaan cenderung untuk beroperasi dengan teknologi yang semakin canggih, dan terkadang ada perubahan standar profesional dengan aturan perusahaan. Perubahan mendasar tersebut mengakibatkan lingkungan operasi organisasi menjadi semakin kompleks dan mengakibatkan auditor internal kesulitan untuk melakukan tugas auditnya atau menerapakan standar profesional dengan kejelasan yang memadai.

Menurut Kahn *et al.* dalam Ahmad dan Taylor (2009) mengemukakan bahwa ambiguitas peran juga dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi merasa tidak puas dengan perannya, mengalami kecemasan, memutarbalikkan fakta, dan kinerjanya menurun. Oleh sebab itu, auditor internal yang menghadapi ambiguitas peran kemungkinan sulit untuk menjaga tetap bersikap independen (Ahmad dan Taylor, 2009). Kedua, tentang konflik

peran atau *Role Conflict*. Menurut Robbins (2015:183) konflik peran adalah suatu keadaan dimana individu dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan atau berlawanan. Konflik ini ada bila seorang individu mendapatkan bahwa patuh pada persyaratan suatu peran menyebabkan kesulitan untuk memenuhi persyaratan dari peran lain. Dalam peran audit, auditor internal harus menjaga independensi dengan tidak mendasarkan pertimbangan auditnya pada objek pemeriksaan, tetapi dalam peran konsultasi, auditor internal harus bekerja sama dan membantu objek pemeriksaan. Kedua tuntutan profesi ini akan sulit untuk dipenuhi secara bersamaan sehingga akan menimbulkan konflik peran (Ahmad dan Taylor, 2009).

Independen auditor berhubungan dengan objektivitas, guna menaikkan tingkat kehandalan laporan keuangan perusahaan dan untuk mengetahui kewajaran informasi yang ada di dalam laporan keuangan, perlu adanya pemeriksaan yang independen yaitu sikap seseorang untuk bersikap jujur dan tidak memihak dan melaporkan temuan temuannya hanya berdasarkan bukti yang ada. Auditor di asumsikan memiliki independen, baik secara mental maupaun fisik untuk melaksanakan tugas audit agar dapat memberikan pendapat (opini) audit secara objektif. Hal ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan tersebut independen dan tidak memihak (salman sihombing : 2015).

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi independensi auditor internal adalah sebagai berikut:

1. *Role Ambiguity* (X1)

Angga Prasetyo dan Marsono (2011), Gartiria Hutami (2011), Intan Putri Saraswati (2014), Ahmad and Taylor, Freshtina kasna Lovica (2017)

2. *Role Conflict* (X2)

Angga Prasetyo dan Marsono (2011), Gartiria Hutami (2011), Intan Putri Saraswati (2014), Ahmad and Taylor, intan putri permatasari (2018), Freshtina kasna Lovica (2017)

3. Tekanan Klien

Intan putri Saraswati (2014)

4. *Role Overload*

Tiara herdina Setiawan (2018)

5. faktor internal

EH Wirangan (2018)

6. Faktor Eksternal

EH Wirangan (2018)

Tabel 1.1
Faktor- faktor yang mempengaruhi

N O	Nama	Tahun	Role ambiguit y	Role conflict	Tekanan klien	Role overload	Faktor internal	Faktor eksternal
1	Angga prasetyo	2011	✓	✓	-	-	-	-
2	Gartiria Hutami	2011	✓	✓	-	-	-	-
3	Intan Putri Saraswa ti	2014	-	✓	✓	-	-	-

4	Tiara Herdina Setiawan	2018	✓	✓	-	✓	-	-
5	Intan putri Permata sari	2018	-	✓	-	-	-	-
6	EH Wirangan	2018	-	-	-	-	✓	✓
7	Freshtin a kasna Lovica	2017	✓	✓	-	-	-	-

Keterangan : Tanda (√) = berpengaruh

Tanda (-) = tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Angga Prasetyo dan Marsono (2011) yang berjudul *Role Ambiguity* dan *Role Conflict* terhadap Independensi Auditor Interna. Variabel yang diteliti Angga Prsetyo dan Marsono *Role Ambiguity* (X1), *Role Conflict* (X2), dan Independensi Auditor Internal (Y).

Adapun persamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu pada variabel *Role Ambiguity* (X1), *Role Conflict* (X2), dan Independensi

Adapun perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut :

1.. Tempat penelitian, pada penelitian sebelumnya di Inspektorat daerah Kepulauan Riau hasil penelitian yang dilakukan bahwa *role conflict* tidak berpengaruh terhadap independensi auditor internal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah *role ambiguity* dan *role conflict* berpengaruh terhadap independensi auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia di kota Bandung.

Berdasarkan uraian diatas mengingat *role ambiguity* dan *role conflict* berpengaruh terhadap independensi auditor internal, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH *ROLE AMBIGUITY* DAN *ROLE CONFLICT* TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL (Studi pada PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Adanya ketidakjelasan peran atau *Role ambiguity* pada auditor internal
2. Terjadinya *role conflict* pada auditor internal
3. Tidak adanya sikap independensi auditor internal sehingga tujuan audit sulit untuk tercapai

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana *role ambiguity* auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung.
2. Bagaimana *role conflict* auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung.
3. Bagaimana independensi auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh *role ambiguity* terhadap independensi auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh *role conflict* terhadap independensi auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *role ambiguity* auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *role conflict* auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui independensi auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *role ambiguity* terhadap independensi auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung secara parsial
5. Untuk seberapa besar pengaruh dan *role conflict* terhadap independensi auditor internal pada PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung secara parsial.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kagunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah audit khususnya *role ambiguity* dan *role conflict* terhadap independensi auditor internal.

2. Bagi Perusahaan/ Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan *role ambiguity* dan *role conflict*, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membantu dalam meningkatkan independensi auditor internal.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh *Role Ambiguity* dan *Role Conflict* terhadap Independensi Auditor Internal.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengaruh *role ambiguity* dan *role conflict* terhadap independensi auditor internal. Selain itu, dapat juga dipergunakan sebagai bahan pertimbangan antara teori dan praktik yang sebenarnya di dalam sebuah instansi yang selanjutnya sebagai bahan referensi untuk peneliti lebih lanjut.

1.6 Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT Kereta Api Indonesia di Kota Bandung yang

berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, Babakan Ciamis, Sumurbandung, Bandung. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan April 2019 sampai dengan selesai.